

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DENGAN STATUS
PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PADA PT. KIMIA YASA DI KOTA
SURABAYA**

Nadya Gita Dellarosa
Universitas Nasional

Correspondence		
Email:	No. Telp:	
Submitted 8 Oktober 2025	Accepted 11 Oktober 2025	Published 12 Oktober 2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas perlindungan hukum preventif^[1] dan represif bagi pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di PT. KIMIA YASA. Melalui metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis^[2], studi kasus ini mengkaji kesenjangan antara regulasi (das sollen) dan implementasi di lapangan (das sein). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan preventif terhambat oleh praktik penempatan pekerja PKWT pada pekerjaan inti dan minimnya pemahaman pekerja. Sementara itu, perlindungan represif tidak berjalan efektif karena keengganan pekerja menempuh jalur hukum akibat posisi tawar yang lemah.

1. Pendahuluan

Hubungan kerja melalui Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi pilihan strategis bagi perusahaan untuk menjaga fleksibilitas operasional di tengah dinamika industri. Namun, status ini seringkali menempatkan pekerja dalam posisi rentan terhadap ketidakpastian kerja dan potensi pelanggaran hak-hak normatif. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan krusial mengenai efektivitas perlindungan hukum yang disediakan oleh negara. Penelitian ini secara spesifik mengkaji implementasi perlindungan hukum bagi pekerja PKWT di PT. KIMIA YASA, Surabaya, untuk menganalisis kesenjangan antara regulasi dengan realitasnya.

Meskipun kerangka hukum ketenagakerjaan telah mengatur PKWT, implementasi di tingkat perusahaan seringkali belum terungkap secara mendalam. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas perlindungan hukum preventif dan represif bagi pekerja PKWT di PT. KIMIA YASA. Dengan menggunakan teori perlindungan hukum^[3], penelitian ini mengkaji bagaimana peraturan formal diterapkan dalam praktik serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat akses pekerja terhadap keadilan. Temuan ini penting untuk memberikan gambaran nyata mengenai realitas perlindungan pekerja kontrak di Indonesia.

2. Landasan Teori

Kerangka analisis utama dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum. Teori ini mendefinisikan perlindungan hukum sebagai suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum melalui perangkat hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif. Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dengan memberikan pedoman dan batasan yang jelas. Sebaliknya, perlindungan represif berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa yang telah timbul melalui lembaga peradilan atau mekanisme lainnya. Teori ini menjadi landasan untuk menganalisis bagaimana hak-hak subjek hukum dijamin dan dipulihkan oleh sistem hukum yang berlaku.

Dalam konteks hukum ketenagakerjaan, teori perlindungan hukum menjadi sangat relevan karena adanya ketidakseimbangan posisi tawar antara pekerja dan pengusaha^[5]. Teori ini melegitimasi intervensi negara melalui peraturan perundang-undangan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja. Perlindungan ini mencakup aspek ekonomis, sosial, dan teknis, seperti penetapan upah minimum, jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja, serta kepastian status hubungan kerja. Dengan demikian, hukum tidak dipandang netral, melainkan berpihak

untuk melindungi pihak yang lebih lemah guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh pekerja.

Secara spesifik, penelitian ini mengaplikasikan teori perlindungan hukum untuk menganalisis status pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Pekerja PKWT seringkali berada dalam posisi yang lebih rentan terhadap pemutusan hubungan kerja sepihak dan ketidakpastian kelangsungan kerja dibandingkan pekerja tetap. Oleh karena itu, teori ini akan digunakan sebagai pisau analisis untuk mengkaji efektivitas perlindungan preventif dalam regulasi yang mengatur PKWT serta implementasi perlindungan represif yang tersedia bagi pekerja di PT. KIMIA YASA ketika hak-hak mereka dilanggar.

3. Metodologi Penelitian

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji secara langsung bagaimana norma hukum mengenai perlindungan pekerja PKWT diimplementasikan dalam praktik nyata di perusahaan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, dengan metode studi kasus yang difokuskan pada PT. KIMIA YASA di Kota Surabaya. Penggunaan metode studi kasus memungkinkan analisis yang mendalam dan kontekstual terhadap permasalahan spesifik yang dihadapi oleh pekerja kontrak dalam lingkup organisasi yang diteliti.

Melalui pendekatan yuridis sosiologis, penelitian ini akan menganalisis kesenjangan antara peraturan perundang-undangan sebagai hukum dalam tataran ideal (*das sollen*) dengan penerapannya secara faktual di lapangan (*das sein*). Fokus analisis tidak hanya terbatas pada teks peraturan, tetapi juga mencakup faktor-faktor non-hukum yang memengaruhi efektivitas perlindungan preventif dan represif. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran utuh mengenai realitas perlindungan hukum yang diterima oleh pekerja PKWT di PT. KIMIA YASA.

Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian di PT. KIMIA YASA, dengan informan kunci yang meliputi perwakilan manajemen bagian sumber daya manusia serta beberapa pekerja berstatus PKWT. Data ini krusial untuk mengungkap implementasi faktual di lapangan. Sementara itu, data sekunder meliputi bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik.

Teknik pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara semiterstruktur dengan para informan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai pelaksanaan dan permasalahan perlindungan hukum. Selain itu, digunakan pula teknik dokumentasi dengan menganalisis isi kontrak kerja PKWT dan dokumen internal perusahaan yang relevan. Untuk mengumpulkan data sekunder, peneliti menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menginventarisasi, mengkaji, serta menganalisis berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan normatif dalam penelitian ini untuk dianalisis secara kualitatif.

4. Hasil dan Pembahasan

Analisis Implementasi Perlindungan Hukum Preventif bagi Pekerja PKWT di PT. KIMIA YASA

Berdasarkan analisis dokumen perjanjian kerja dan wawancara di PT. KIMIA YASA, implementasi perlindungan hukum preventif secara formal telah dijalankan melalui pembuatan kontrak kerja secara tertulis. Perjanjian tersebut telah mencantumkan klausul esensial seperti identitas para pihak, jenis pekerjaan, upah, serta durasi kontrak yang jelas. Namun, temuan di

lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan praktik, khususnya terkait jenis pekerjaan yang diperjanjikan, dimana beberapa posisi bersifat inti dan berkelanjutan yang seharusnya tidak diikat dengan status PKWT.

Kelemahan lain dalam aspek preventif teridentifikasi pada minimnya pemahaman pekerja mengenai hak-hak mereka, terutama terkait uang kompensasi saat kontrak berakhir. Meskipun perusahaan telah menganggarkan hak tersebut, sosialisasi yang tidak memadai sebelum penandatanganan kontrak membuat pekerja berada dalam posisi tawar yang lemah. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan aturan formal tidak serta-merta menjamin efektivitas perlindungan preventif apabila tidak didukung oleh transparansi informasi dan kesetaraan posisi antara pengusaha dengan para pekerja kontrak.

Efektivitas Perlindungan Hukum Represif dan Tantangan Penerapannya bagi Pekerja PKWT di PT. KIMIA YASA

Dari hasil wawancara, mekanisme perlindungan hukum represif melalui jalur penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum pernah dimanfaatkan oleh pekerja PKWT di PT. KIMIA YASA. Meskipun secara normatif tersedia, para pekerja cenderung menghindari jalur litigasi maupun mediasi karena adanya kekhawatiran yang kuat terhadap pemutusan kontrak atau tidak diperpanjangnya perjanjian kerja. Posisi tawar yang sangat lemah ini menciptakan keengganan untuk menempuh jalur hukum, sehingga pelanggaran hak seringkali tidak terselesaikan dan dibiarkan begitu saja demi menjaga kelangsungan pekerjaan.

Tantangan utama dalam penerapan perlindungan represif adalah minimnya pengetahuan pekerja mengenai prosedur hukum yang harus ditempuh serta ketiadaan serikat pekerja yang secara khusus mengadvokasi kepentingan mereka. Keterisolasian pekerja kontrak membuat mereka rentan dan tidak memiliki kekuatan kolektif untuk memperjuangkan haknya. Selain itu, beban pembuktian yang sulit dan proses yang memakan waktu serta biaya menjadi disinsentif yang signifikan, menyebabkan efektivitas perlindungan represif menjadi sangat rendah dalam praktik di lapangan bagi pekerja PT. KIMIA YASA.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi perlindungan hukum preventif bagi pekerja PKWT di PT. KIMIA YASA secara formal telah terpenuhi melalui kontrak tertulis, namun secara substansial belum efektif. Penggunaan PKWT untuk jenis pekerjaan inti yang berkelanjutan dan minimnya pemahaman pekerja mengenai hak kompensasi menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dengan praktik di lapangan. Hal ini menegaskan bahwa keberadaan aturan formal tidak menjamin perlindungan nyata ketika tidak diimbangi dengan transparansi informasi dan posisi tawar yang seimbang.

Di sisi lain, perlindungan hukum represif bagi pekerja PKWT di perusahaan tersebut terbukti tidak berfungsi. Mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang tersedia secara normatif tidak pernah diakses oleh pekerja akibat kekhawatiran terhadap pemutusan hubungan kerja. Posisi tawar yang sangat lemah, ditambah minimnya pengetahuan hukum dan ketiadaan serikat pekerja, menjadikan jalur hukum sebagai opsi yang tidak realistis. Akibatnya, pelanggaran hak yang terjadi cenderung tidak terselesaikan dan mekanisme represif menjadi lumpuh dalam praktiknya.

Related links:

- [1] [\[PDF\] Peace and Socio-Legal Recovery 1. \(n.d.\). Retrieved from https://www.academia.edu/35289102/Peace_and_Socio_Legal_Recovery_1](https://www.academia.edu/35289102/Peace_and_Socio_Legal_Recovery_1)
- [2] [Implementasi Perlindungan Anak terhadap Eksploitasi Pengamen \(2025\). Diakses dari https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Konstitusi/article/download/1152/1092/5942](https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Konstitusi/article/download/1152/1092/5942)

-
- [3] [BAB II KERANGKA TEORI, HASIL PENELITIAN, DAN ... Diakses dari https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/30100/3/T1_312019037_Bab%20II.pdf](https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/30100/3/T1_312019037_Bab%20II.pdf)
- [4] [Jurnal Hukum Magnum Opus Februari 2021 Volume 4, Nomor 1. \(2021, February 1\). Retrieved from https://www.academia.edu/45159426/Jurnal_Hukum_Magnum_Opus_Februari_2021_Volume_4_Nomor_1](https://www.academia.edu/45159426/Jurnal_Hukum_Magnum_Opus_Februari_2021_Volume_4_Nomor_1)
- [5] [Kontrak Kerja: Analisis Hukum dan Implementasi. \(2025\). Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/393425181_Kontrak_Kerja_Analisis_Hukum_dan_Implementasi](https://www.researchgate.net/publication/393425181_Kontrak_Kerja_Analisis_Hukum_dan_Implementasi)